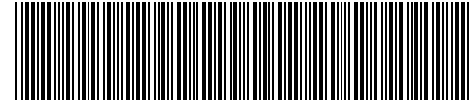




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.667778/2022**



DS:3884-1008-4415-0229

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
 3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
 4. Kode>Nama Satker : (667778) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
- Sebesar : Rp. 259.675.000 (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM
013.09.BG. Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 259.675.000
Rp. 259.675.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 259.675.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 259.675.000

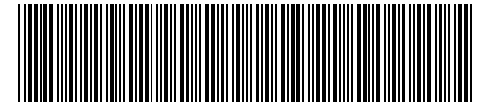
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.09.2.667778/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3884-1008-4415-0229

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667778) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM				259.675.000
Kegiatan	:	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah				259.675.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM				
		2. 01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah				
		3. 02	jumlah kab/kota peduli HAM				
		4. 03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5255.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan		15.646.000
Rincian Output	:	01	ABD.003 Rekomendasi Analisis Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan		15.646.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5255.AEA Koordinasi	1,00	kegiatan		92.878.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Koordinasi antar Pemerintah Daerah	1,00	Kegiatan		92.878.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5255.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,00	Lembaga		137.501.000
Rincian Output	:	01	BDB.001 Fasilitasi Proses Penilaian Kab/Kota Peduli HAM	1,00	Lembaga		49.318.000
		02	BDB.002 Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah	1,00	Lembaga		42.035.000
		03	BDB.003 Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	1,00	Rekomendasi		46.148.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	5255.BMA Data dan Informasi Publik	1,00	layanan		13.650.000
Rincian Output	:	01	BMA.001 Layanan Penyediaan Informasi dan Dokumentasi HAM	1,00	Layanan		13.650.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.09.2.667778/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



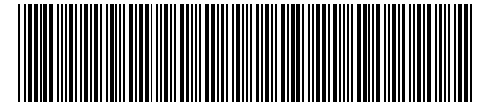
DS:3884-1008-4415-0229

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667778) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667778	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	-	259.675	-	-	-	259.675		
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-	259.675	-	-	-	259.675		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	259.675	-	-	-	259.675		
5255.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	15.646	-	-	-	15.646	33.00	
01	RM	-	15.646	-	-	-	15.646	065	
5255.AEA	Koordinasi (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	92.878	-	-	-	92.878	33.00	
01	RM	-	92.878	-	-	-	92.878	065	
5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	137.501	-	-	-	137.501	33.00	
01	RM	-	137.501	-	-	-	137.501	065	
5255.BMA	Data dan Informasi Publik (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	13.650	-	-	-	13.650	33.00	
01	RM	-	13.650	-	-	-	13.650	065	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.09.2.667778/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3884-1008-4415-0229

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667778) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

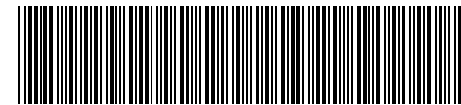
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	13.650	-	-	-	13.650	065	
JUMLAH		-	259.675	-	-	-	259.675		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.09.2.667778/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3884-1008-4415-0229

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (667778) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

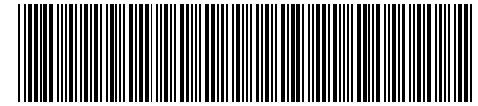
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667778	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	22.262	259.675
		BELANJA BARANG	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	22.262	259.675
	013.09.BG.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	22.262	259.675
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583	22.262	259.675

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.09.2.667778/2022
IV A. B L O K I R**



DS:3884-1008-4415-0229

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667778] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

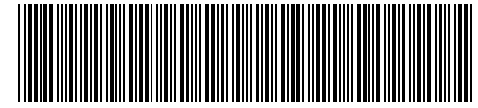
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.09.2.667778/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:3884-1008-4415-0229

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [667778] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001